

ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SOLODATA DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (DISKOMINFO SP) KOTA SURAKARTA

Muhammad Thoriq Setiawan, Rino Ardhian Nugroho

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret

Email : thoriqset18@student.uns.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan cara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP) Kota Surakarta telah memperkenalkan suatu inovasi bernama Solodata, yang ditujukan untuk memperbaiki layanan publik terutama dalam manajemen data pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan agar dapat menganalisis penerapan *e-government* pada aplikasi SoloData di Diskominfo SP Kota Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan alat ukur kinerja yaitu *Balanced Scorecard e-Government* oleh Richardus Eko Indrajit (2006), terdapat 5 dimensi sebagai fokus penerapan *e-government*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SoloData telah memenuhi 3 dari 5 dimensi utama pada alat ukur kinerja yang digunakan untuk penelitian ini. Penerapan aplikasi SoloData oleh Diskominfo SP Kota Surakarta merupakan contoh nyata manajemen perubahan dalam transformasi digital pemerintahan. Karena, masih terdapat kendala yang pada aplikasi SoloData seperti belum terhubungnya aplikasi SoloData dengan SDI (Satu Data Indonesia) dikarenakan keterbatasan sumber daya pada Diskominfo SP dan masih banyak masyarakat Kota Surakarta yang belum mengetahui tentang aplikasi pengolahan data pembangunan daerah berbasis web ini serta kegunaan dari aplikasi SoloData.

Kata Kunci : *e-government*, SoloData, Kota Surakarta

Abstract

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) in governance aims to improve performance in an efficient, effective, transparent, and accountable manner. The Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption (DISKOMINFO SP) of Surakarta City has introduced an innovation called SoloData, which is intended to enhance public services, particularly in regional development data management. This research was conducted to analyze the implementation of e-government through the SoloData application at DISKOMINFO SP Surakarta. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. This study uses the e-Government Balanced Scorecard performance measurement tool developed by Richardus Eko Indrajit (2006), which consists of five dimensions as the focus for e-government implementation. The results of the study indicate that the SoloData application has fulfilled three out of the five main dimensions of the performance measurement tool used in this research. The implementation of the SoloData

application by DISKOMINFO SP Surakarta represents a concrete example of change management in the digital transformation of governance. However, there are still challenges in the application of SoloData, such as its lack of integration with the One Data Indonesia (SDI) system due to limited resources at DISKOMINFO SP, as well as the fact that many residents of Surakarta are still unaware of this web-based regional development data processing application and its benefits.

Keyword : e-government, SoloData, Kota Surakarta

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pemerintahan Indonesia. Penggunaan TIK kini menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan, mengingat kebutuhan zaman yang memerlukan kecepatan dan efisiensi. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pemanfaatan TIK diyakini memberikan sejumlah manfaat positif yang lebih banyak (Kurnia et al. 2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdapat sisi positif dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat dalam pengelolaan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Selain itu, TIK juga berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ada pula yang menginginkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai prinsip kecepatan, kualitas, dan biaya. Peningkatan pelayanan publik secara cepat berarti pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah baru agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia sudah menerapkan konsep *e-government* menggunakan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Strategi Nasional terkait *e-government*. Instruksi ini mengamanatkan agar forum pemerintah harus memanfaatkan teknologi berita menjadi wahana pendukung pada pengelolaan & penyediaan layanan publik. Secara keseluruhan, *e-government* mengacu pada penyelenggaraan layanan pemerintah yang memakai sistem teknologi berita berbasis elektronik. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, istilah E-government dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu konsep yang dilakukan lembaga pemerintah pada rangka anugerah pelayanan pada warga secara lebih efektif & efisien (Ibrahim, Arief, and Abdullah 2020). Dengan adanya anugerah pelayanan yang berbasis elektro tentu bisa mempertinggi kualitas pemerintah pada anugerah pelayanan yang digunakan oleh warga. Pemanfaatan E-Government dalam penyediaan layanan terus mendorong pemerintah untuk berinovasi dan merancang sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara langsung (Lumbanraja, 2020). Dalam kerangka pelayanan kepada publik, E-Government dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan

mengubah persepsi terkait dengan proses administrasi yang umumnya memakan waktu yang cukup lama.

Kota Surakarta, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP), telah menerapkan sistem informasi untuk mengelola data dan informasi dengan tujuan meningkatkan pembangunan daerah. Ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat sangat penting, mengingat masyarakat saat ini memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi, di mana faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang diperlukan. Salah satu bentuk nyata dari pembangunan daerah tersebut dapat diperkuat dengan memperbaiki proses pengembangan data analitik di setiap unit kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Gambar 1.

Tampilan awal aplikasi SoloData



Sumber :

solodata.surakarta.go.id

SoloData adalah sebuah aplikasi manajemen informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP) Kota Surakarta. Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah untuk memenuhi peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 tahun 2020 mengenai implementasi Satu Data Kota Surakarta. Peluncuran SoloData dimulai pada bulan Agustus 2020, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan E-government berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019. Aplikasi ini menjadi inovasi dalam pelayanan publik dengan mengintegrasikan pengelolaan data pembangunan daerah dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan "Satu Data" (Single Data System) yang mudah diakses oleh siapapun. Single Data System sendiri menurut Peraturan Gubernur No.52 tahun 2016 pasal 1 yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan

dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah. SoloData menawarkan berbagai fitur pengelolaan data dan sistem informasi, termasuk aplikasi untuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), SDG's (Sustainable Development Goals), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), SPM (Standar Pelayanan Minimal), SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), SDA (Sumber Daya Alam), dan Gender. Dashboard SoloData memiliki fitur menu pencarian data yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, memastikan bahwa data yang diakses bersifat publik. Aplikasi ini akan menggabungkan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tahap awal, Pemerintah Kota mengintegrasikan data dari lima OPD, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan data dari OPD-OPD lainnya, dengan harapan bahwa data tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan sebelum mengambil kebijakan.

Inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Aplikasi SoloData merupakan manifestasi dari konsep Smart City. Smart City yaitu ide perencanaan perkotaan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Konsep Smart City dianggap sebagai solusi untuk berbagai tantangan dalam pembangunan kota di berbagai daerah. Smart City dirancang untuk meningkatkan produktivitas penduduknya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digital secara optimal di seluruh sektor, mulai dari manajemen bangunan, pemantauan kualitas lingkungan, hingga pelayanan publik. Dengan pendekatan Smart City, berbagai data serta informasi yang tersebar di berbagai area kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang dipasang di seluruh kota. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan aplikasi cerdas dan disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat. Pengguna juga dapat berinteraksi secara langsung dengan aplikasi ini melalui gadget mereka, bahkan menjadi penyedia data dengan mengirimkan informasi ke pusat data untuk digunakan oleh pengguna lainnya. Cohen (2010) Konsep kota cerdas dapat diidentifikasi melalui enam dimensi utama, yaitu smart government (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart society (kehidupan sosial cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), dan quality of life (hidup berkualitas). Dalam implementasinya, kota tersebut dapat memilih untuk fokus pada salah satu dimensi berdasarkan karakteristik dan urgensi permasalahan yang dihadapi. Adapun kota di Indonesia yang telah menerapkan konsep smart city diantaranya Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Contohnya, Bogor telah mengembangkan Bogor Green Room (BGR) sebagai pusat

data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kependudukan, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari warganya. Jakarta memiliki Smart City Lounge, yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengoperasikan Smart City melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta menampung pengaduan masyarakat terkait masalah sosial, kemacetan, banjir, sampah, kriminalitas, dan pelayanan publik. Di Bandung, terdapat inisiatif seperti Hay U untuk perizinan online, SIP untuk pelaporan Camat oleh warga, serta citizen complaint online. Pemerintah Kota Solo juga aktif dalam mewujudkan Solo sebagai Smart City dengan menggandeng beberapa instansi swasta, seperti Bukalapak, Grab, dan Emtek, sebagai akselerator Kota Masa Depan dalam sebuah kolaborasi nyata untuk masa depan yang lebih baik.

Aplikasi SoloData merupakan salah satu platform yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Surakarta sejak tahun 2020. Portal ini dapat diakses melalui perangkat gadget yang terhubung ke internet. Dalam pelaksanaan penerapan E-government melalui aplikasi SoloData, masih terdapat beberapa kendala. Sebagai contoh, terdapat penyempurnaan yang diperlukan pada situs web yang tidak dapat diakses karena adanya kesalahan pada servernya. Diskominfo SP Kota Surakarta juga tengah berupaya agar aplikasi SoloData dapat terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengisian open data yang masih dilakukan secara manual oleh Diskominfo SP, menyebabkan proses memakan waktu lebih lama. Selain itu, perlu pemahaman yang jelas mengenai cara mengintegrasikan Aplikasi SoloData dengan open data untuk dapat terkoneksi dengan Portal Satu Data Indonesia. Upaya yang sedang dilakukan adalah memastikan bahwa Aplikasi SoloData sudah terintegrasi dengan open data yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks pemerintah daerah kabupaten/kota, tingkat kesulitan implementasi Sistem Data Terpadu (SDI) berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L). Pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota, urusan konkuren melibatkan banyak bidang urusan pemerintahan. Setiap bidang memiliki keunikan dan selalu terkait dengan pemerintah pusat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai peluang dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan SDI di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap penerapan *e-government* pada aplikasi SoloData di Diskominfo SP Kota Surakarta. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang menganalisis sejauh mana penerapan e-government telah diimplementasikan melalui aplikasi SoloData, serta bagaimana kinerjanya berdasarkan indikator yang terukur. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas aplikasi SoloData sebagai bagian dari upaya digitalisasi pemerintahan daerah, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*, khususnya dalam konteks pengelolaan data pembangunan daerah di Surakarta dan wilayah lainnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dengan aplikasi SoloData. Sedangkan teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Adapun validitas data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber guna memperoleh data yang valid. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis E-Government dalam Penerapan Aplikasi Solodata di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Sp) Kota Surakarta

A. Analisis *e-government* pada aplikasi SoloData

Aplikasi SoloData merupakan inovasi merupakan inovasi dari pemerintah Kota Surakarta untuk memusatkan data-data sektoral yang mencakup yang dimiliki oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Surakarta, data yang diunggah oleh OPD akan digunakan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJLP). Tujuan dari dirancangnya aplikasi SoloData yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang informasi dan transaksi, dan juga berkenaan dengan perwujudan dari Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan adanya kebijakan Perpres Nomor 39 tahun 2019 dan Perwali Nomor 21 tahun 2020, dimana OPD pada tingkat daerah dituntut untuk memiliki portal data terpusat yang dapat diakses oleh masyarakat maupun lembaga dengan konteks data pembangunan daerah.

Adanya Aplikasi SoloData yang dikembangkan oleh Diskominfo pada pelayanan publik juga sebagai wujud pengembangan Daerah Kota Surakarta, tidak hanya sebagai pengembangan daerah juga dengan adanya aplikasi SoloData ini pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal mempercepat proses dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan

data sektoral yang bersifat terbuka atau dapat diakses oleh publik, meningkatkan transparansi pemerintah dengan mempublikasikan informasi, meningkatkan efisiensi (uang, waktu, dan sumber daya lain).

Menganalisis aplikasi SoloData dengan perspektif e-Government (Indrajit et al. 2006) pada penelitian ini yaitu untuk menjabarkan apakah aplikasi SoloData yang dikembangkan oleh Diskominfo SP Kota Surakarta sudah menerapkan 5 dimensi yang ada, yaitu 1) Dimensi manfaat ; 2) Dimensi efisiensi ; 3) Dimensi partisipasi ; 4) Dimensi transparansi ; 5) Dimensi manajemen perubahan.

1. Dimensi Manfaat

Manfaat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu guna, faedah, laba, ataupun untung. Manfaat yang dimaksud pada dimensi ini yaitu keuntungan dan dampak positif yang diberikan oleh pemerintah dengan aplikasi SoloData kepada pengguna atau publik, dengan adanya dimensi manfaat ini dapat untuk mengukur sejauh mana pemerintah dengan aplikasi SoloData dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk publik.

Aplikasi SoloData merupakan inovasi dari pemerintah Kota Surakarta, dimana inovasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna yang ingin mencari atau membutuhkan data sektoral Kota Surakarta. Oleh karena itu, meskipun secara keseluruhan SoloData telah memberikan dampak positif bagi pengguna, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penyediaan informasi pendukung yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik digital secara menyeluruh. Dengan adanya SoloData pengguna jadi merasa diuntungkan, karena tidak perlu lagi untuk mendatangi dinas terkait yang memiliki data. Cukup membuka SoloData dan cari pada kolom menu pencarian data sektoral yang tersedia, hal ini juga tidak membutuhkan waktu yang banyak daripada sebelum adanya SoloData. Jika dilihat dari teori dimensi penerapan e-government yaitu *balanced e-government scorecard* pada dimensi manfaat maka Diskominfo SP Kota Surakarta telah memberikan manfaat bagi publik dengan mengembangkan aplikasi pengolahan data sektoral tingkat kota atau SoloData, adapun pedoman teknis aplikasi SoloData yang dapat diunduh langsung oleh masyarakat yang baru pertama kali ingin menggunakan aplikasi SoloData. Pedoman teknis tersebut tersedia pada laman resmi milik Diskominfo SP Kota Surakarta, pada pedoman teknis tersebut juga menjelaskan dengan detail fungsi dari menu-menu yang tersedia pada aplikasi SoloData.

2. Dimensi Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara tepat dan optimal tanpa adanya pemborosan (Aplonia Lau, 2023). Merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Efisiensi memiliki makna ketepatan cara dalam menjalankan suatu hal tanpa membuang waktu, uang, atau tenaga. Secara garis besar kata Efisiensi adalah kegiatan dimana memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan menggunakannya secara optimal agar tidak menyianyikan apa yang sudah ada.

Aplikasi SoloData yang dikelola oleh Diskominfo SP Kota Surakarta telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Efisiensi ini tercermin dari pemanfaatan sumber daya secara optimal, seperti kerja sama dengan pihak Telkom dalam pengelolaan server dan penggunaan platform digital untuk mengurangi biaya operasional. Aksesibilitas data menjadi lebih mudah karena pengguna tidak lagi perlu meminta data langsung ke OPD terkait, melainkan bisa mengakses melalui portal web atau aplikasi mobile. Pendanaan yang berasal dari APBD dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan dan operasional aplikasi. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf dan admin tiap tahun juga meningkatkan kompetensi pengelola sistem. Dari sudut pandang pengguna, aplikasi SoloData terbukti juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta mempermudah proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh penggunanya.

3. Dimensi Partisipasi

Kata Partisipasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam suatu proses pada organisasi. Partisipasi juga dapat diartikan menyarankan kelompok atau masyarakat untuk ikut andil dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan suatu keputusan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat harapannya agar tercipta hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat, dimana tujuan utama dari dikembangkannya aplikasi SoloData yaitu memudahkan pengguna mendapatkan data sektoral Kota Surakarta. Dengan adanya aplikasi SoloData, secara tidak langsung untuk mewujudkan good governance di Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengguna dan pengelola aplikasi SoloData, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan aplikasi SoloData masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum tersedianya fitur umpan balik (feedback) langsung dalam

aplikasi, tidak adanya akses komunikasi langsung dengan stakeholder atau pengelola data, serta kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai cara untuk terlibat dalam proses pengembangan. Meskipun pemerintah telah menyediakan jalur partisipasi seperti melalui Musrenbangkot dan survei kepuasan masyarakat (SKM), mekanisme tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan fitur komunikasi dan penyampaian aspirasi pada SoloData agar peran serta masyarakat dapat lebih optimal dan berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan data sektoral di Kota Surakarta.

4. Dimensi Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Transparansi juga dapat diartikan keterbukaan atau kejelasan, dalam konteks pemerintahan transparansi berarti keterbukaan informasi oleh pemerintahan kepada pengguna dimana informasi yang dimaksud dapat dengan mudah diakses oleh pengguna tanpa ada yang disembunyikan. Dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menandakan pemerintahan tersebut jujur dan dapat meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Contoh transparansi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah seperti halnya penyediaan laporan keuangan publik, penyediaan data mengenai kebijakan pemerintah, keterbukaan pemerintah dalam membuat atau mengusulkan kebijakan yang akan diambil, dan lain sebagainya. Sama halnya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta melalui Diskominfo SP yang sudah diterapkan pada aplikasi SoloData.

Aplikasi SoloData merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyediaan data pembangunan daerah yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya dijadikan sumber utama dalam pengambilan kebijakan dan belum memiliki fitur permohonan data dikarenakan bukan tupoksi dari aplikasi tersebut, SoloData telah berhasil mendorong keterbukaan informasi dan kolaborasi antar OPD dalam mengelola data publik. Tantangan utama yang dihadapi adalah frekuensi pembaruan data yang bervariasi dan kesiapan sumber daya manusia di dinas terkait, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pembaruan data agar aplikasi ini dapat berfungsi optimal sebagai basis pengambilan keputusan pemerintah Kota Surakarta.

5. Dimensi Manajemen Perubahan

Dimensi manajemen perubahan dalam penerapan aplikasi e-government merupakan aspek penting untuk memastikan transisi digital

berjalan efektif dan berkelanjutan. Perubahan yang dihadirkan oleh e-government tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh aspek budaya kerja, proses birokrasi, hingga pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan manajemen perubahan dibutuhkan untuk memetakan risiko, mengantisipasi resistensi, serta mengarahkan seluruh elemen organisasi agar mampu beradaptasi terhadap sistem baru. Dengan adanya dimensi manajemen perubahan, pemerintah dapat mempersiapkan pengembangan program yang ingin dilaksanakan dengan aspek sumber daya yang dimiliki saat ini. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh pihak Diskominfo SP Kota Surakarta pada aplikasi SoloData pada awal penerapannya dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan belum adanya portal data yang dimiliki Kota Surakarta. Aplikasi SoloData merupakan inovasi digital yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surakarta pada Agustus 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Peluncuran ini dilakukan oleh Wali Kota saat itu, FX Hadi Rudyatmo, sebagai bagian dari upaya integrasi data pembangunan daerah melalui sistem informasi yang terpusat dan dapat diakses oleh pengguna.

Penerapan aplikasi SoloData oleh Diskominfo SP Kota Surakarta merupakan contoh nyata manajemen perubahan dalam transformasi digital pemerintahan. Pengembangan aplikasi ini dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif, melibatkan masukan dari berbagai pihak, baik internal pemerintah maupun masyarakat dan akademisi, guna memastikan aplikasi benar-benar sesuai kebutuhan dan bermanfaat luas. Strategi pengembangan SoloData tidak hanya mengandalkan arahan dari atas (top-down), tetapi juga mengakomodasi aspirasi dari bawah (bottom-up), serta belajar dari pengalaman daerah lain melalui studi banding dan penyesuaian dengan kondisi lokal. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi SoloData dijalankan secara aktif dan terencana, dengan Diskominfo sebagai wali data yang bertanggung jawab atas kontrol, pemeliharaan, dan evaluasi sistem, sementara pengisian data menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Keterlibatan serta motivasi pegawai juga menjadi perhatian utama, karena keberhasilan implementasi aplikasi sangat bergantung pada partisipasi aktif dan komitmen seluruh unsur organisasi. Secara keseluruhan, strategi manajemen perubahan yang diterapkan telah mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik lagi, khususnya pada aplikasi SoloData

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta yang membahas tentang analisis penerapan *e-government* pada Aplikasi SoloData. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penerapan *e-government* pada Aplikasi SoloData dengan menggunakan teori *Balanced Scorecard e-Government*, yang mengacu pada 5 dimensi.

Dimensi Manfaat, aplikasi SoloData sudah memberikan manfaat dimana penggunanya merasa diuntungkan karena tidak harus lagi mengunjungi dinas yang memiliki data terkait data sektoral Kota Surakarta, dan juga pengguna juga diuntungkan dalam segi waktu dan juga tenaga. Dimensi Efisiensi, pada dimensi ini pihak Diskominfo SP Kota Surakarta telah mengupayakan yang terbaik untuk aplikasi SoloData, diantaranya dengan memaksimalkan anggaran untuk pengembangan dan inovasi SoloData, pelatihan bagi pegawai maupun admin SoloData, mengembangkan SoloData agar dapat diakses melalui smartphone, dan menjalin kerjasama dengan pihak Telkom untuk menghemat biaya operasional dari SoloData itu sendiri. Dimensi Partisipasi, dapat disimpulkan kurang berjalan dengan baik karena aplikasi SoloData tidak memiliki akses untuk pengguna kepada stakeholder Kota Surakarta, dan pengguna kurang dilibatkan dalam pengembangan aplikasi SoloData. Metode pengembangan SoloData hanya melalui musrenbangkot dan forum OPD saja. Dimensi Transparansi, kurang berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta belum pernah menggunakan SoloData sebagai sumber pengambilan kebijakan ataupun keputusan untuk Kota Surakarta, dan SoloData tidak menyediakan fitur untuk pengguna memohon data, dan memantau status permohonan data. Hal ini dikarenakan bukan tupoksi dari adanya Aplikasi SoloData yang hanya sebagai penyedia data sektoral Kota Surakarta. Tidak hanya itu, SoloData juga terkendala dari frekuensi data yang diupload oleh masing-masing OPD sebagai memiliki data tersebut. Dimensi Manajemen Perubahan, pihak Diskominfo SP Kota Surakarta mengembangkan Aplikasi SoloData dengan menggabungkan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan visioner. Diskominfo SP juga telah melakukan studi banding dengan aplikasi penyedia data sektoral daerah lain seperti dari Kota Magelang dan Kota Sumedang. Diskominfo SP Kota Surakarta juga aktif berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dalam menyusun kebijakan, merancang SOP, serta melakukan monitoring dan evaluasi sistem secara berkala untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai harapan.

Dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi SoloData telah memenuhi 3 dimensi dari 5 dimensi utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan *e-government* menurut (Indrajit, 2006). Dengan demikian, pelaksanaan *e-government* pada aplikasi SoloData telah mendukung terwujudnya inisiatif “Solo Satu Data”, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan,

terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat dan transparansi data. Aplikasi ini telah menjadi pondasi penting dalam penyediaan data sektoral yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern di Kota Surakarta.

Pada penelitian ini penerapan e-government pada Aplikasi SoloData yang berjalan dibawah naungan pihak Diskominfo SP Kota Surakarta sudah berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna Aplikasi SoloData, tetapi masih perlu adanya perbaikan atau inovasi pada beberapa fungsinya yang berguna untuk memaksimalkan pelayanan bagi pengguna Aplikasi SoloData. Sehubungan dengan itu, peneliti berusaha memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk Aplikasi SoloData. Bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta selaku pengelola dan penyelenggara Aplikasi SoloData terkait dengan dimensi partisipasi dan dimensi transparansi yang merujuk pada teori Balanced Scorecard e-Government, perlu adanya peningkatan keterlibatan pengguna dengan cara menambahkan fitur komentar atau diskusi pada Aplikasi SoloData. Dengan adanya fitur tersebut pengguna dapat menyampaikan pendapat, saran, bahkan kritik secara langsung terhadap layanan atau data yang tersedia pada SoloData. Tidak hanya itu dengan adanya fitur komentar atau diskusi, pihak Diskominfo SP Kota Surakarta dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah atas laporan yang diterima dari penggunanya dan mengambil tindakan atas laporan tersebut. Pihak Diskominfo Kota Surakarta juga dapat menambahkan fitur permohonan data apabila banyak masyarakat pengguna yang belum mengetahui tentang PPID dan tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengajukan permohonan data sektoral yang pengguna butuhkan.

Referensi

- Aplonia Lau, Elfreda. 2023. "Efektivitas Dan Efisiensi Melalui Pemanfaatan Runout Time(Rot) Method." *Jurnal Exchal* 5(1):1–11.
- Cahyadi, Adi. n.d. "KONSEP DAN PERMASALAHAN Latar Belakang Dan Konsep." 1–12.
- Dimas Cahyo Nugroho, & Anisa Nabila Hasan. (2024). PENYUSUNAN MODEL BALANCED SCORECARD DAN APLIKASI SEDERHANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DKI JAKARTA. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 8(4), 121–130. <https://doi.org/10.8734/musytari.v8i4.5681>.
- Habibie, Dedi Kusuma. 2018. "CITIZEN-CENTRIC E-GOVERMENT PELAYANAN PUBLIK." (1):1–8.
- Ibrahim, Adelina, Assaf Arief, and Saiful Do Abdullah. 2020. "Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis." *IJIS - Indonesian Journal On Information System* 5(2):135. doi: 10.36549/ijis.v5i2.105.
- Indrajit, Eko, Electronic Government, Konsep Pelayanan, Public Berbasis, and

- Teknologi Informasi. 2006. "Prof. Eko Indrajit , Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet Dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006 1."
- Islami, Maulia Jayantina. 2021. "Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan Dan Critical Success Factors (CSFs)." *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 10(1):13. doi: 10.31504/komunika.v10i1.3750.
- Kurnia, Titon Slamet, Umbu Rauta, Arie Siswanto, Fakultas Hukum, Universitas Kristen, Satya Wacana, and Jawa Tengah. 2017. "E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN." (2).
- Lumbanraja, Anggita Doramia. 2020. "Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi." 3(2):220–31.
- Moeheriono. 2012. *Kinerja Pengukuran Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasi, Novlentina, Abdul Kadir, Fakultas Hukum, and Universitas Medan Area. 2017. "Jurnal Administrasi Publik Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Dairi Implementation of Regional Management Information System Accrual Based to Dairi District Government Sistem Informasi Manajem." 7(13):49–63.
- Rusdi, Ahmad, Roni Ekha Putera, and Kusdarini. 2022. "Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di DPMPTSP Kota Padang." *JlAP:Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10(1):26–48.
- Setyawan, Arief, Achluddin Ibnu Rochim, and Bambang Kusbandrijo. 2022. "PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR." 2(02):43–52.
- Yeni, Afni, Seflidiana Roza, and Sabri Wahyu. 2023. "Pengaruh Kepemimpinan , Struktur Organisasi , Kedisiplinan , Dan Motivasi Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Kasus Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Solok)." *Journal Bintang Manajemen* (1):76–87.